

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia

2.1.1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini memiliki tujuan yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Meningkatkan peran pelaku

usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industry kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha serta meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

2.1.2. Sejarah Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal yang amat penting karena memiliki tujuan yaitu mengembangkan perekonomian dan juga meningkatkan pelayanan publik yang ada di Indonesia. Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa di Indonesia ini sering kali mengalami perubahan dalam rangka penyempurnaan dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa yang sudah ada. Peraturan pengadaan barang dan jasa yang diberlakukan saat ini yaitu peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 yang merupakan perubahan dari peraturan presiden nomor 16 tahun 2018. Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa ini terus mengalami perubahan demi keberlangsungan pembangunan negara.

Tujuan dilakukannya perubahan terus menerus pada peraturan pengadaan barang dan jasa ini selain untuk tujuan pembangunan nasional dan peningkatan publik yaitu untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengaturan pengadaan barang dan jasa yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat terutama dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan

usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan. Tujuan lain perubahan peraturan yang berlaku yaitu karena masih terdapat kekurangan pada peraturan pengadaan barang dan jasa sebelumnya dan masih belum dapat mencakup kebutuhan pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa yang ada di Indonesia.

Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah ini sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia yaitu pada *Algemene voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van openbare werken* atau lebih di kenal dengan AV 41. Lalu setelahnya aturan ini berubah menjadi undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Pada awalnya peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah ini hanya sebatas keputusan presiden yaitu Keputusan Presiden RI nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Lalu pada tahun 2010 peraturan ini berubah menjadi Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 sebagai pengganti Keputusan Presiden no 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2012 terbitlah peraturan kepala LKPP nomor 14 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia ini hamper selalu mengalami perubahan dengan rentan waktu 1-3 tahun sekali hingga sekarang peraturan yang digunakan merupakan

peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 yang merupakan perubahan dari peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain beracuan pada peraturan presiden mengenai pengadaan barang dan jasa, peraturan lainnya yang berelasi juga patut untuk dipelajari seperti peraturan mengenai anggaran negara karena pengadaan barang dan jasa ini juga merupakan uang yang berasal dari APBN yang harus digunakan dengan sebaik mungkin.

2.2. Profil Singkat Negara Maju dan Berkembang Lainnya

2.2.1. Jepang

Jepang merupakan salah satu negara maju yang terletak di Benua Asia. Bahkan, apabila dilihat dari sudut ekonomi, Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia. GDP (produk domestik bruto, yaitu nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di Jepang dalam setahun) adalah kedua tertinggi di dunia, dan merk-merk Jepang seperti Toyota, Sony, Fujifilm, dan Panasonic terkenal di seluruh dunia. Industri manufaktur adalah salah satu kekuatan Jepang, tapi negara ini miskin akan sumber daya alam. Pola umum yang dijalankannya adalah sebagai berikut: Perusahaan-perusahaan Jepang mengimpor bahan-bahan mentah, lalu mengolah dan membuatnya sebagai barang jadi, yang dijual di dalam negeri atau diekspor. Salah satu bidang yang memberi harapan bagi pertumbuhan ekonomi Jepang adalah perobotan, di mana teknologi

Jepang memimpin dunia. ASIMO, robot humanoid (berbentuk seperti manusia) dikembangkan oleh Honda, dapat berjalan dengan dua kaki dan berbicara bahasa manusia. Di masa dekat ini, robot akan aktif dalam berbagai bidang dan mungkin hidup berdampingan dengan manusia, seperti dalam film-film fiksi sains.

2.2.2. Kanada

Meskipun Kanada termasuk dalam 10 negara industri terbesar di dunia, Kanada tetap mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam bidang teknologi tinggi dan industri jasa. Perekonomiannya semakin beragam dan berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Tidak lagi hanya mengandalkan sumber alam, perekonomian Kanada juga tumbuh berkat inovasi dan teknologi. Kebanyakan industri pembuatan barang industri milik Kanada berada di Ontario dan Quebec, di mana produksi kendaraan bermotor merupakan sektor terbesar dalam industri ini. Sektor pembuatan barang lain yang penting meliputi makanan dan minuman, kertas dan produksi sejenisnya, logam dasar, logam buatan, petrokimia dan kimia. Bagian Atlantik, Prairi dan Pasifik Kanada mempunyai lebih banyak ekonomi berlandaskan sumber daya alami. Provinsi Pacific fokus pada perikanan, kehutanan dan pertambangan, sedangkan provinsi Prairi bergantung pada pertanian dan bahan bakar mineral. Sektor utama British Columbia ialah kehutanan dan pertambangan, serta pariwisata.

2.2.3. Belanda

Belanda merupakan negara dengan perekonomian terbesar keenam di Uni Eropa, negara ini berperan penting sebagai pusat transportasi eropa karena surplus perdagangannya yang tinggi dan konsisten, hubungan industri yang stabil, dan pengangguran yang rendah. Industri berfokus pada pemrosesan makanan, bahan kimia, pemurnian minyak bumi, dan mesin listrik. Sektor pertanian yang sangat mekanis hanya mempekerjakan 2% dari angkatan kerja tetapi memberikan surplus bear untuk pemrosesan makanan dan menopang status negara sebagai eksportir pertanian terbesar kedua di dunia. Belanda adalah bagian dari zona euro, dan dengan demikian, kebijakan moneternya dikendalikan oleh Bank Sentral Eropa. Sektor keuangan Belanda sangat terkonsentrasi, dengan empat bank komersial memiliki lebih dari 80% aset perbankan, dan empat kali lebih besar dari PDB Belanda.

2.2.4. Tunisia

Di bidang ekonomi, Tunisia menyimpan begitu banyak potensi karena memiliki beberapa sektor utama yang selama ini menopang perekonomian negara seperti pertanian, perkebunan, pariwisata dan jasa. Sektor-sektor itu terus berkembang dan mampu bertahan dalam kondisi yang tidak kondusif sekalipun. Tunisia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kurma dan produk zaitun (buah serta minyak) terbesar di kawasan dengan potensi nilai ekspor yang cukup besar dan cakupan pasar

yang cukup luas. Dalam sektor lain, pariwisata dan jasa, Tunisia sebagai negara yang eksotik dan memiliki pemandangan yang luar biasa indah bisa menyerap banyak wisatawan mancanegara maupun domestik setiap tahunnya. Wisatawan mancanegara umumnya berasal dari negara di kawasan Eropa (Perancis, Inggris dan Jerman) dan kawasan Maghribi (Libya, Aljazair).